

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT

3.1 Sejarah Singkat Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut.

Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

3.2 Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan Nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992-1997.

Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Untuk pertama kali kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

3.3 Visi, Misi dan Dasar Hukum Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Setiap Organisasi Pengelolaan Zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan visi dan misi inilah aktivitas akan terarah dengan baik. Adapun Visi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, yaitu:

“ Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah dan Profesional di Provinsi Riau”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Amil Zakat Provinsi Riau merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen yang modern, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat.
4. Menjangkau muzakki dan mustahiq yang seluas-luasnya.
5. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari pada meminta dikalangan umat Islam.

Adapun dasar hukum Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 66/I/2010.

3.4 Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau Periode 2013-2016

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 2013-2016 adalah sebagai berikut:

1. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Gubernur Riau
Wakil Ketua	: Ketua DPRD Provinsi Riau
Sekretaris	: KA. Kanwil Depag Prov. Riau
Wakil Sekretaris	: Rektor UIN Suska Riau
Anggota	: Dr. H. Mustafa Umar, MA
Anggota	: Ir. H. Zulkifli Saleh
Anggota	: Drs. H. M. Yusuf Ahmad

2. KOMISI PENGAWAS

Ketua	: Drs. H. Wan Syamsir Yus
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Mahdini, MA
Sekretaris	: Drs. H. Said. Saqlul Amri
Wakil Sekretaris	: Prof. Dr. H. Irwan Efendi, M.Sc
Anggota	: Drs. H. Bin Fajri
Anggota	: Dr. Heri Sunandar, MCL
Anggota	: Dr. H. Marwan Awaluddin

3. BADAN PELAKSANA

Ketua	: Drs. H. Auni M. Noor, M.Si
Wakil Ketua I	: H. Azwar Aziz, SH. M. Si
Wakil Ketua II	: Drs. H. A. Jalaluddin
Sekretaris	: Drs. H. Syamsul
Wakil Sekretaris I	: Drs. H. Irhas
Wakil Sekretaris II	: Marila, S.Ag
Bendara	: Mahmud M, Bc. Hk

4. BIDANG PENGUMPULAN

Ketua	: H. Fajeriansyah Lc. MA
Sekretaris	: Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. MA
Anggota	: H. Heri Indra Putra, SE
Anggota	: H. Soeripto Hasan
Anggota	: Drs. H. Sukmadi Mukmin

5. BIDANG PENDISTRIBUSIAN

Ketua	: Drs. H. Zulkifli
Sekretaris	: Muhammad Yunus, SHI
Anggota	: Ardison, S. Ag
Anggota	: H. Hamdan Yafiz, S. Pdi
Anggota	: H. Hasan Amal

6. BIDANG PENDAYAGUNAAN

Ketua	: Drs. H. Syahril Ali, M. Ag
Sekretaris	: Jamhur Rahmat, Lc. MA

Anggota : Drs. Ahmad Syafruddin, MA

Anggota : Musliadi, A.Ag

Anggota : Bahruslim, B. Sc. SP

7. BIDANG PENGEMBANGAN

Ketua : Drs. H. Ahmad Supardi, MA

Sekretaris : Edi Ahmad, SIP. MAP

Anggota : H. Abdul Somad, Lc. MA

Anggota : Abdul Wahid, S.Ag

Anggota : Drs. H. Abdul Razak Z. MM

Gambaran umum mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 8 dan 9; tugas pokok Badan Amil Zakat adalah:

- a. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZ Provinsi Riau ke Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau).

2. Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas masing-masing satuan pada Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi:

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

d. Tugas Bidang-Bidang pada Badan Pelaksana

1. Bidang Pengumpulan

- a. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik dari perorangan maupun badan.

- b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak (seperti bank, perusahaan dll) di wilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau perusahaan atas persetujuan muzakki.
- d. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

2. Bidang Pendistribusian

- a. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- b. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
- c. Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat).
- d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

3. Bidang Pendayagunaan

- a. Menyalurkan zakat yang bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik secara

perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.

- b. Menyusun dan menetapkan prosedur program pemberdayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Melakukan studi kelayakan.
 - 2. Menetapkan jenis usaha produktif.
 - 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - 5. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.
- c. Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.
- d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.

4. Bidang Pengembangan

- a. Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
- b. Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
- c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
- d. Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang zakat dan fiqh zakat.

3.5 Program Unggulan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau

Program-program berikut bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara komprehensif (menyeluruh) yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Program Riau Takwa

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda.

2. Program Riau Peduli

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah, yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di Kabupaten/Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Program Riau Makmur

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq dan syukur-syukur menjadi muzakki. Antara lain dengan didirikan kampung binaan di beberapa daerah, pelatihan wirausaha/wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah, dan lain sebagainya.

4. Program Riau Cerdas

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti program pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi;

Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana); yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan (dhuafa), bekerjasama dengan Dikti dan perguruan tinggi-perguruan tinggi; mendirikan rumah pintar/taman, bacaan, mobil pintar, dan sebagainya.

5. Program Riau Sehat

Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhuafa dan masakin, seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid, memperjalankan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerja sama dengan dinas kesehatan dan PMI Provinsi Riau.